



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
MANOKWARI**

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI
NOMOR 91 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
MANOKWARI TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025–2029, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 18 Tahun 2025, dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan dan instrumen pendukung pencapaian target kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025–2029.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025- 2029 melalui Surat Keputusan Kepala SMK Kehutanan Negeri Manokwari.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kehutanan

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.
10. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TENTANG RENCANA STRATEGIS SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Revisi SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian integral dari Peraturan Kepala Sekolah ini.

Pasal 2

Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kerangka kebijakan, arah program, serta proyeksi pembiayaan bagi pelaksanaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam periode lima tahunan, yang disusun selaras dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025–2029 yang tercantum dalam Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (SAKTI) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta menjadi bagian integral dari Dokumen Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari

Pada tanggal 29 Desember 2025

KEPALA SEKOLAH,



Imron Muslimin, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 198611062015021002



RENSTRA 2025-2029

SMK Kehutanan Negeri Manokwari



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) Manokwari Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Renstra SMKKN Manokwari 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan satuan kerja. Rencana Strategis (Renstra) SMK Kehutanan Negeri Manokwari ini adalah implikasi dari terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan adalah lembaga pendidikan formal tingkat menengah kejuruan yang bertujuan menyiapkan peserta didik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra ini merupakan pedoman kerja bagi SMK Kehutanan Negeri Manokwari agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik, oleh karena itu dibutuhkan penyajian dan arahan yang jelas. Meskipun demikian, karena renstra ini berlaku lima tahun dan harus selalu

mengikuti trend perkembangan saat ini, maka renstra ini perlu dilakukan penyempurnaan. Hal ini dibutuhkan sebagai bentuk antisipasi dari terjadinya dinamika perubahan yang terjadi saat ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunya Rencana Strategis ini.

Manokwari, 14 Agustus 2025

Kepala Sekolah,



Imron Muslimin, S.Pd.I., M.Pd.

NIP. 198611062015021002

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2025 - 20259.....	26
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	26
B. Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Badan P2SDM	29
C. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun2025-2029	30 30
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	32
A. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan <i>Output</i> Kegiatan	32
B. Komponen Kegiatan untuk masing-masing <i>Output</i> Kegiatan	35
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
A. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan	36
B. Target Kinerja.....	37
C. Kerangka Pendanaan	37
BAB V. PENUTUP	39
LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1. Lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024	2
Tabel 2. Struktur Kurikulum Merdeka	6
Tabel 3. Fasilitas Sarana dan Prasarana SMK Kehutanan Negeri Manokwari	10
Tabel 4. Fasilitas Pendukung Pembelajaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari	11
Tabel 5. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	12
Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari	31
Tabel 7. Komponen Kegiatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari	32
Tabel 8. Target IKK SMK Kehutanan Negeri Manokwari Per Tahun	34
Tabel 9. Rencana Alokasi Pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2020-2024	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Analisis SWOT	24
Gambar 2. Cascading SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025-2029.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yaitu 5 (lima) SMK Kehutanan Negeri yang menjadi Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan P2SDM. SMKKN tersebut terdapat di 5 (lima) lokasi di seluruh Indonesia, yaitu SMKKN Kadipaten yang berlokasi di Kadipaten dengan wilayah pelayanan Provinsi di seluruh Pulau Jawa dan Bali, SMKKN Pekanbaru yang berlokasi di Pekanbaru dengan wilayah pelayanan seluruh Pulau Sumatera, SMKKN Samarinda yang berlokasi di Samarinda dengan wilayah pelayanan Provinsi di seluruh Pulau Kalimantan, SMKKN Makassar yang berlokasi di Makassar dengan wilayah pelayanan Provinsi seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku Utara dan SMKKN Manokwari yang berlokasi di Manokwari dengan wilayah pelayanan di Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku.

SMK Kehutanan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat. Dalam melaksanakan tugas tersebut SMK Kehutanan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah.
3. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis lingkup Kementerian LHK tahun 2020-2024 dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM serta untuk menjamin

terlaksananya akuntabilitas kinerja, maka SMK Kehutanan Negeri Manokwari sebagai suatu satuan kerja perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Capaian Kinerja SMKKN Manokwari Tahun 2020-2024

Sebagai satuan unit kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, capaian kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari mengacu pada arah kebijakan dan strategi Badan P2SDM tahun 2020 – 2024 yang diterjemahkan dengan indikator kinerja utama dan sasaran yang harus dicapai SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Sebagaimana tertuang dalam Renstra SMK Kehutanan Negeri Manokwari tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) capaian target kinerja utama yang menjadi beban kinerja organisasi yakni target lulusan sebanyak 450 lulusan selama 5 tahun dan pembangunan Kampus II di Sorong. Pembangunan kampus II SMK Kehutanan Negeri Manokwari di Sorong merupakan upaya dari Kementerian Kehutanan dalam mendukung pengembangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Pembangunan kampus II ini diharapkan dapat mendukung proses pendidikan secara memadai sehingga mampu mempromosikan peningkatan kapasitas dan kapabilitas lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, secara umum kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada Tahun 2020-2024 tidak mencapai target sesuai yang diharapkan baik pada capaian target lulusan maupun pada target penyelesaian pembangunan kampus II di Sorong. Ketidaktercapaian target lulusan sebagaimana yang diamanatkan disebabkan adanya pengunduran diri / pindah sekolah oleh beberapa peserta didik dengan berbagai alasan. Berikut data lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024.

Tabel 1. Lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target Lulusan	Realisasi Lulusan	Presentase Kelulusan (%)
1	2020	70	70	100
2	2021	66	66	100
3	2022	65	65	100
4	2023	66	66	100
5	2024	83	79	95,18

Ketidaktercapaian target kinerja ini menjadi tugas bersama pihak manajemen dan semua pihak yang terlibat untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola organisasi sehingga target-target yang ditetapkan dapat dikelola dan dicapai sesuai dengan yang diamanatkan. Perbaikan tata Kelola tersebut perlu dilakukan disemua bagian manajemen baik pada pengelolaan tenaga pendidik maupun kependidikan serta pengelolaan fasilitas pendukungnya.

Pada Capaian target kinerja pada pembangunan Kampus II di Sorong yang proses pembangunannya dimulai tahun 2024, sampai dengan berakhirnya periode 2020-2024 ini telah mencapai $\pm 80\%$ dari target penyelesaian yang ditetapkan dan masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

Potensi dan Permasalahan

SMK Kehutanan Negeri Manokwari saat ini merupakan satu-satunya UPT dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas dan fungsi pokok dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kehutanan di wilayah timur Indonesia dengan wilayah pelayanannya mencakup 8 Provinsi yakni 5 provinsi di wilayah Papua dan 3 provinsi di wilayah Maluku. Hal ini menunjukkan peran penting SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam penyiapan dan penyediaan tenaga tehnis menengah di bidang kehutanan khususnya di wilayah timur Indonesia.

Untuk menjawab dinamika kebutuhan kualifikasi SDM yang mampu bersaing dan yang menjadi terdepan dalam hubungannya dengan pemenuhan tenaga teknis khususnya dibidang kehutanan seperti yang tertuang pada profil SMK Kehutanan Negeri, maka diperlukan sebuah perencanaan yang jelas dan terukur. Risalah yang lengkap tentang kondisi terkini menjadi hal penting dalam penyusunan rencana pengembangan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Gambaran kondisi riil (*existing condition*) ini perlu diketahui untuk memetakan potensi maupun factor yang menjadi penghambat organisasi berdasarkan kondisi terkininya. Perubahan-perubahan yang terjadi terkait rencana pengembangan maupun berbagai faktor baik eksternal maupun internal

yang mempengaruhinya juga menjadi bagian penting dalam pemetaan kondisi terkini di SMK Kehutanan Negeri Manokwari.

Untuk memberikan gambaran riil tentang kondisi terkini, dibutuhkan alat analisis yang mampu menjabarkan berbagai hal yang berpengaruh dan menentukan dalam pengambilan keputusan perencanaan.

Analisis SWOT merupakan sebuah tools atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal suatu organisasi atau perusahaan yang menggambarkan situasi yang sedang atau yang mungkin akan dihadapi. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang factor-faktor yang mendukung pengembangan organisasi baik secara internal maupun eksternalnya, juga factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengembangan organisasi secara internal maupun eksternal. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis pada proses perencanaan.

Potensi lingkungan internal akan tergambarkan melalui **Strengths** (kekuatan) dan **Weakness** (kelemahan), sedangkan potensi lingkungan eksternal akan dilihat dari **Opportunities** (peluang) dan **Threats** (ancaman). Selanjutnya dari pemetaan potensi lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut, dilakukan kajian melalui untuk merumuskan strategi pengembangan dan selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka mencapai profil satuan pendidikan yang telah dirumuskan.

1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis ini bertujuan untuk memahami apa yang menjadi keunggulan dan kekurangan organisasi termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi yang tepat. Analisis Lingkungan Internal dilakukan dengan menginventarisir berbagai hal yang menjadi kekuatan (**Strengths**) atau faktor-faktor yang mendukung pengembangan sekolah, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat baik pada internal SMK Kehutanan Negeri Manokwari maupun lingkungan eksternalnya. Adapun **Strengths** (kekuatan), **Weakness** (kelemahan) tersebut disajikan sebagai berikut:

a.Strengths (Kekuatan)

Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan yang dimiliki SMK Kehutanan Negeri Manokwari, sebagai berikut :

1) Organisasi Sekolah

SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang telah berdiri kurang lebih tujuh belas (17) tahun, telah dapat memenuhi standarisasi organisasi pengelolaan yang telah digariskan. Capaian dari organisasi ini tergambar dari telah adanya izin operasional, nomor (kode) sekolah serta telah terakreditasinya sekolah oleh lembaga yang berwenang. Keberadaan organisasi yang sudah mapan ini berimbas pada kesempatan untuk menerima berbagai bantuan yang untuk pengembangan sekolah. Disamping itu dengan pengakuan akreditasi yang dimiliki oleh sekolah juga berpengaruh pada penerimaan lulusan oleh Lembaga Pendidikan tinggi maupun pihak perusahaan atau lembaga pemerintah yang membutuhkan tenaga teknis menengah.

SK Pendirian Sekolah	Izin Operasional	Nomor Kode Sekolah	Akreditasi
P.44/Menhut-II/2009 tanggal 2010-02-09	800.2.2.1/2022 tanggal 2022-01-03	60403809	A

2) Kurikulum

SMK Kehutanan Negeri Manokwari juga telah menerapkan kurikulum terbaru yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Hal ini menunjukkan bahwa SMK Kehutanan Negeri Manokwari memiliki SDM dan kemampuan manajemen yang memadai untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Kurikulum yang digunakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Manokwari pada tahun pelajaran 2025/2026 mengacu pada implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Kehutanan Negeri Manokwari didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 025/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri

Pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap I, dan diberlakukan bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2022/2023.

Tabel 2. Struktur Kurikulum Merdeka
Tabel 2a. Struktur Kurikulum kelas X SMK/MAK
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu, dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran		Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5 Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. KELOMPOK MATA PELAJARAN UMUM:				
1.	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	90	18	108
2.	Pendidikan Pancasila	54	18	72
3.	Bahasa Indonesia	108	36	144
4.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	90	18	108
5.	Sejarah	54	18	72
6.	Seni Budaya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	54	18	72
7.	<i>Muatan Lokal***</i>	72	-	72
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Umum (A):		450	126	576
B. KELOMPOK MATA PELAJARAN KEJURUAN:				
1.	Matematika	108	36	144
2.	Bahasa Inggris	108	36	144
3.	Informatika	108	36	144
4.	Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial****	162	54	216
5.	Dasar-dasar Program Keahlian	432	-	432
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B):		918	162	1080
Jumlah A+B		1368	288	1656

Keterangan:

- * Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.
- ** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari).
- *** Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
- **** Proporsi JP antara aspek Ilmu Pengetahuan Alam dan aspek Ilmu Pengetahuan Sosial disesuaikan dengan kebutuhan Program Keahlian.

Tabel 2b. Struktur Kurikulum kelas XI SMK/MAK
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu, dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran		Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5 Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. KELOMPOK MATA PELAJARAN UMUM:				
1.	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	90	18	108
	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	90	18	108
2.	Pendidikan Pancasila	54	18	72
3.	Bahasa Indonesia	90	18	108
4.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	54	18	72
5.	Sejarah	54	18	72
6.	Muatan Lokal**	72	-	72
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Umum (A):		342	90	432
B. KELOMPOK MATA PELAJARAN KEJURUAN:				
1.	Matematika	90	18	108
2.	Bahasa Inggris	108	36	144
3.	Mata Pelajaran [Konsentrasi Keahlian]***	648	-	648
4.	Projek Kreatif dan Kewirausahaan	180	-	180
5.	Mata Pelajaran Pilihan****	144	-	144
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B):		1170	54	1224
Jumlah A+B		1512	144	1656

Keterangan:

- * Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.
- ** Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
- *** Nama mata pelajaran merupakan nama Konsentrasi Keahlian.
- **** Nama mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik.

Tabel 2c. Struktur Kurikulum Kelas XII SMK/MAK (Program 3 Tahun)
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu: PKL = 18 minggu, mata pelajaran lainnya = 18 {mingguan 1 JP = 45 menit})

Mata Pelajaran		Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi P5 Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. KELOMPOK MATA PELAJARAN UMUM:				
1.	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	36	18	54
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	36	18	54
	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	36	18	54

	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	36	18	54
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	36	18	54
	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	36	18	54
2.	Pendidikan Pancasila	36	-	36
3.	Bahasa Indonesia	36	18	54
4.	<i>Muatan Lokal**</i>	36	-	36
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Umum (A):		108	36	144
B. KELOMPOK MATA PELAJARAN KEJURUAN:				
6.	Matematika	54	-	54
7.	Bahasa Inggris	72	-	72
8.	Mata Pelajaran [Konsentrasi Keahlian]***	396	-	396
9.	Projek Kreatif dan Kewirausahaan	90	-	90
10.	Praktik Kerja Lapangan****	792	-	792
11.	Mata Pelajaran Pilihan*****	108	-	108
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B):		1512	-	1512

Menilik dari struktur kurikulumnya, Kurikulum Merdeka yang merupakan kurikulum pendidikan yang dirancang untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan kontekstual, inklusif, dan berpusat pada peserta didik. Pendekatan yang digunakan menekankan pada pengembangan potensi peserta didik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kreatif. Tujuan lain dari Kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral peserta didik, melalui model pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran karakter dan moral. Pada pelaksanaannya, kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada tenaga pendidik untuk mengembangkan pembelajaran sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

3) Penerapan kurikulum yang sesuai dengan bidang pekerjaan

Merujuk pada luas hutan dan potensinya, hutan di wilayah Indonesia dan khususnya di Papua memiliki prospek yang menjanjikan untuk dikelola dan dimanfaatkan. Sesuai dengan spesifikasi bidang kejuruan yang dijalankan, SMK Kehutanan Negeri Manokwari memiliki keunggulan dalam menghasilkan tenaga teknis

yang bersesuaian dengan kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di tingkat tapak. Penyediaan tenaga teknis menengah yang berkualitas ini dilakukan salah satunya melalui proses penyusunan Kurikulum yang terus mengupdate dan mengakomodir berbagai perkembangan kebutuhan bidang pekerjaan di bidang kehutanan.

Dalam mengikuti program pendidikannya, peserta didik di SMK kehutanan Negeri Manokwari diarahkan untuk memilih salah satu dari empat (4) mata pelajaran peminatan (pilihan) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk mengikuti program Sertifikasi Keahlian di kelas XII sebagai bagian dari portofolio lulusan. Adapun keempat mata pelajaran peminatan tersebut meliputi :

1. Pengukuran dan penguji kayu bulat
2. Pemaduan Wisata Alam
3. Produksi benih dan bibit tanaman hutan
4. Pembuatan Peta Hasil Pengolahan Titik GPS

Penetapan mata pelajaran kejuruan pilihan ini didasarkan pada potensi kebutuhan bidang pekerjaan kehutanan khususnya yang ada di wilayah Maluku dan Papua.

4) Tata Tertib Sekolah

Tata tertib sekolah adalah seperangkat aturan dan norma yang disusun untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, dan kondusif. Tata tertib yang disusun bertujuan untuk mendukung program pembinaan peserta didik dalam membangun sikap disiplin, pembentukan karakter, etika kerja, dan sikap profesional yang akan sangat dibutuhkan di dunia industri dan kehutanan nantinya.

Program pembinaan peserta didik di SMK Kehutanan Negeri Manokwari mengacu pada tata tertib yang diterbitkan oleh BP2SDM yaitu peraturan Kepala BP2SDM nomor : P.10/P2SDM/SET/KUM.1/5/2016 tentang Pembinaan Peserta didik SMK Kehutanan Negeri. Tujuan dari tata tertib tersebut adalah untuk menjamin proses pembinaan di 5 (lima) SMK Kehutanan Negeri di bawah binaan BP2SDM menjadi seragam dengan tetap memperhatikan karakteristik

wilayah masing-masing. Melalui tata tertib ini, diharapkan terbangun model pembinaan yang menghasilkan SDM yang memiliki sikap mental dan karakter yang mampu bekerja di di bidang kehutanan.

5) Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pokok

SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam penyelenggaraan pendidikannya menerapkan sistem boarding school (sekolah berasrama), sehingga fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki pun bertautan dengan system Pendidikan yang diterapkan. Fasilitas sarpras yang dimiliki dapat digolongkan kedalam fasilitas penunjang pendidikan dan pembinaan serta fasilitas pendukung pembelajaran. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia tersebut secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Fasilitas Sarana Dan Prasarana Penunjang Pendidikan dan Pembinaan SMK Kehutanan Negeri Manokwari

No	Nama Barang Milik Negara	Luas (M2)	KONDISI
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	40,716	Baik
2.	Bangunan Ruang Tenaga pendidik	120	Baik
3.	Bangunan Laboratorium Komputer	80	Baik
4.	Bangunan Mushola	61	Baik
5.	Bangunan Kapel	89	Baik
6.	Bangunan Ruang Kelas, Perpustakaan dan Laboratorium	504 (2 Lantai)	Baik
7.	Bangunan Ruang Kelas Baru	138	Baik
8.	Rumah Kepala Sekolah	127	Baik
9.	Rumah KSBTU	80	Baik
10.	Rumah Dinas Wakasek (4 rumah)	74	Baik
11.	Rumas Dinas Pegawai 4 rmh	54	Baik
12.	Bangunan RLPS 2 ruangan	120	Baik
13.	Bangunan Lavatory (2 lantai)	15	Baik
14.	Bangunan Asrama 1	508	Baik
15.	Bangunan Asrama 2	294	Baik
16.	Bangunan Asrama 3	445	Baik
17.	Bangunan Asrama 4	445	Baik
18.	Bangunan Asrama 5	301	Baik
19.	Bangunan Asrama 6	301	Baik
20.	Bangunan Asrama 7	235	Baik
21.	Persemaian semi permanen	135	Baik
22.	Persemaian permanen	204	Baik
23.	Garasi	93	Baik
24.	Lapangan Basket	420	Baik

No	Nama Barang Milik Negara	Luas (M2)	KONDISI
25.	Pendopo	57	Baik
26.	Garasi	93	Baik
27.	Pos Penjaga	12	Baik

Sumber : SMK Kehutanan Negeri Manokwari, 2025, Secara Lengkap Lihat Laporan BMN

Melihat dari gambaran di atas, terlihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana pokok pada SMK Kehutanan Manokwari dilihat dari standar minimal suatu sekolah sudah cukup tersedia.

Tabel 4. Fasilitas Pendukung Pembelajaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari

No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi	
			Baik	Rusak
A. Peralatan Ruang Lab. Komputer				
1.	Komputer PC	26	26	
2.	Komputer Server	1	1	
3.	LCD Proyektor	1	1	
4.	AC	2	2	
5.	Meja	31	31	
6.	Kursi	31	31	
B. Peralatan Praktek Lapangan				
1.	Gerobak	2	2	
2.	Mesin Gergaji	2	2	
3.	Gergaji Chain Saw	3	2	1
4.	GPS Receiver	10	10	
5.	Clino meter	29	10	19
6.	Kompas Geologi	5	5	
7.	Kompas	20	20	
8.	Spiegel Relesko	2	2	
9.	Teropong	13	13	
10.	Teropong Optik	10	10	
11.	Neraca analitis	5	5	
12.	Drone	2	2	
13.	Kamera digital	4	4	
14.	Range Finder	2	2	
15.	Soil Meter	7	7	
16.	Microscope	5	5	
17.	Tenda	5	5	
18.	Pelampung	40	40	
C. Peralatan Keg. Ekstrakurikuler				
1.	Band	1 unit		
2.	Drum band	1 unit		

Sumber : SMK Kehutanan Negeri Manokwari, 2025, Secara Lengkap Lihat Laporan BMN

6) Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42 /Menlhk /Setjen /Kum.1 /4/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, tenaga pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Statistik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMK Kehutanan Negeri Manokwari disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.
Ketersediaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

Tabel 5a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) kategori PNS berdasarkan tingkat pendidikan

Jenis PTK	Tingkat Pendidikan												Jumlah	
	S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP	SD		
	Kht	Non	Kht	Non	Kht	Non	Kht	Non	Kht	Non				
Tenaga Pendidik	-	-	2	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	16
Tenaga Kependidikan			1	1	-	11	1	1	1	9	-	1		26
Jumlah														42

Tabel 5b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) kategori P3K dan Tenaga Kontrak berdasarkan tingkat Pendidikan

Jenis PTK	Tingkat Pendidikan												Jum	
	S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP	SD		
	Kht	Non	Kht	Non	Kht	Non	Kht	Non	Kht	Non				
Tenaga Pendidik	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Tenaga Kependidikan					1	1	-	-	-	2		1		5
Jumlah														8

Tabel 5c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) kategori PNS berdasarkan golongan

Jenis PTK	Golongan				Jumlah
	Gol.IV	Gol.III	Gol.II	Gol.I	
Tenaga Pendidik	4	12	-	-	16
Tenaga Kependidikan	1	21	3	1	26
Jumlah					42

Berdasarkan data di atas, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki SMK Kehutanan Negeri Manokwari sudah cukup memenuhi kebutuhan untuk menjalankan proses pembelajaran dan ketatausahaan.

b. Weakness (Kelemahan)

Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang diduga menjadi penyebab tidak optimalnya proses yang dijalankan organisasi. Kelemahan tersebut sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan (internal dan eksternal) yang tidak mendukung bagi proses pembelajaran dan bekerja

Letak SMK Kehutanan yang berbatasan langsung dengan lingkungan umum dan masyarakat dan tanpa adanya pagar pembatas berimbas pada situasi yang tidak mendukung pada keamanan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran serta mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik. Pada level pengawai, kondisi ini mempengaruhi keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

2. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan kurang yang memadai

Mengacu pada data tenaga kependidikan yang dimiliki (Tabel 5.), dari segi jumlah personel yang dimiliki SMK Kehutanan Negeri Manokwari sudah cukup memadai. Namun, dari segi kualifikasi dan kompetensinya belum mampu untuk mendukung kinerja organisasi secara optimal yang berpengaruh pada distribusi pekerjaan dan menyebabkan terjadinya rangkap pekerjaan oleh tenaga pendidik pada beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kependidikan. Kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan dan persyaratan sertifikasi untuk dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu pada fungsional umum bagi tenaga kependidikan juga menjadi kendala bagi organisasi dalam menjalankan mengoptimalkan pekerjaan dan pelayanan.

3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai standar pelayanan

Standar Pelayanan adalah ukuran baku yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan, baik di instansi pemerintah, sekolah, maupun dunia industri yang responsif, berkualitas, akuntabel, dan memuaskan. Untuk menjamin pelayanan standar sebuah organisasi dapat terlaksana secara optimal, dibutuhkan prosedural standar yang efektif dan efisien yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Sebagai organisasi, SMK Kehutanan Negeri Manokwari belum memiliki prosedural standar secara menyeluruh terkait standar pelayanan minimal organisasi sehingga berpengaruh pada alur dan prosedur pelayanan baik secara internal maupun eksternal. Disamping itu penerapan prosedural standar yang sudah tersedia pun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

4. Ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran yang belum memadai

Fasilitas pendukung pembelajaran berupa peralatan praktik memegang peranan penting untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Penggunaan peralatan yang sesuai dengan standar industri memiliki dampak signifikan pada proses pembelajaran dan kualitas hasil pembelajarannya dalam hal ini kompetensi peserta didik yang mengikuti pembelajaran.

Sebagaimana data fasilitas pendukung pembelajaran, SMK Kehutanan Negeri Manokwari telah memiliki peralatan praktik untuk mendukung proses pembelajaran, namun dengan adanya perkembangan kurikulum beberapa peralatan praktek yang ada perlu diupdate dengan jumlah yang memadai. Disamping itu, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium (komputer, bahasa, kimia dan biologi), tempat uji kompetensi, serta fasilitas

teaching factory yang memadai masih belum dimiliki dan perlu dilengkapi.

5. Belum optimalnya proses pembelajaran Teaching Factory

Teaching Factory (Tefa) merupakan salah satu model pembelajaran berbasis produksi dan jasa di SMK yang bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran dalam pengembangan kewirausahaan bagi para peserta didik. Untuk menjamin pelaksanaan model pembelajaran ini, dibutuhkan fasilitas berupa sarana dan prasarana serta kualifikasi pengajar / pembimbing yang sesuai dengan Tefa yang diprogramkan. SMK Kehutanan Negeri Manokwari sampai dengan saat ini belum mampu mengoptimalkan pembelajaran ini yang disebabkan oleh belum tersedianya fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan.

6. Belum optimalnya proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai standar pelayanan yang disusun

Pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah sistem terpadu yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu Input (masukan), Proses, dan Output (keluaran). Melalui pendekatan ini, fungsi pendidikan menjadi lebih terstruktur dan terukur. Dalam kerangka sistem pendidikan, input merupakan salah satu komponen kunci. Dalam konteks sekolah, PPDB menjadi tahap krusial pada komponen input yang menentukan siapa yang akan masuk dan bagaimana kualitas awal peserta didik sesuai syarat akademik dan fisik, minat bakat, atau domisilinya (zona) sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana secara optimal sesuai tujuan satuan pendidikan.

Proses PPDB yang dilaksanakan oleh SMK Kehutanan Negeri Manokwari sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah disusun. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya kurangnya pemahaman calon peserta didik maupun orang tua calon peserta didik terkait alur proses seleksi PPDB serta kualitas jaringan internet yang tidak merata pada wilayah-wilayah pelayanan yang menjadi lokus PPDB.

7. Kurangnya pemahaman orang tua/ masyarakat terkait dunia kerja lulusan SMK Kehutanan yang berimbas pada rendahnya serapan tenaga kerja.

Pandangan kebanyakan para orang tua peserta didik dan masyarakat yang masih beranggapan bahwa lulusan SMK Kehutanan akan diangkat sebagai PNS Kehutanan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada rendahnya keterserapan lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada bidang pekerjaan yang bersesuaian dengan hasil lulusan. Disamping itu masih banyak lulusan untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja pada bidang pekerjaan lainnya (TNI/Polri) juga berkontribusi terhadap rendahnya serapan lulusan pada bidang kehutanan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (OT)

Analisis Lingkungan Eksternal (OT) dilakukan untuk mengetahui opportunities (*peluang*) dan threats (*ancaman*) yang mempengaruhi penyelenggaraan dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Adapun opportunities (*peluang*) dan threats (*ancaman*) tersebut disajikan pada uraian sebagai berikut

a. Opportunities (Peluang)

Ada beberapa peluang yang mempengaruhi penyelenggaraan dan SMK Kehutanan Manokwari. Peluang tersebut antara lain adalah :

1) Potensi Lapangan Pekerjaan Bagi Lulusan Cukup Tersedia

Potensi lapangan pekerjaan bagi tenaga teknis menengah kehutanan yang dihasilkan dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari, pada dunia usaha kehutanan (swasta) serta BUMN masih cukup terbuka. Disamping itu lapangan pekerjaan yang juga dapat dimasuki oleh tenaga teknis antara :

- 1) Sektor Pemerintah : Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, Instruktur Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan, Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS),

Teknisi Litkayasa, Tenaga Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.

- 2) Sektor Swasta/Sektor BUMN : Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Tenaga Teknis Menengah Kehutanan

2) Terbukanya Peluang Kewirausahaan Di Bidang Kehutanan

Dengan adanya kebijakan Kementerian Kehutanan untuk mengembangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat, semakin membuka akses masyarakat dalam lapangan usaha di bidang kehutanan. Lulusan SMK Kehutanan memiliki peluang dalam berwirausaha pada bidang usaha tersebut. Bidang wirausaha yang diharapkan mampu dilaksanakan bagi lulusan :

- 1) Kegiatan aneka usaha kehutanan seperti budidaya lebah madu, budidaya ulat sutra, pemanfaatan hasil hutan rotan dan pengembangan budidaya gaharu merupakan beberapa contoh lapangan wirausaha dibidang kehutanan yang mempunyai prospek cukup menjanjikan.
- 2) Budidaya tanaman kehutanan dan penangkar tanaman langka.
- 3) Pemanfaatan jasa lingkungan yaitu berupa pengelolaan wisata alam dan olah raga tantangan.

3) Dukungan Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan SMK

Pengembangan SMK menjadi salah satu program pemerintah yang mendukung upaya penyediaan SDM unggul dan berkualitas sebagaimana pada visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan tersebut meliputi program penguatan kurikulum, revitalisasi SMK, peningkatan kemitraan dengan dunia industri, pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan, pengembangan Teaching Factory (tefa), pengembangan proyek kewirausahaan, serta adanya dukungan terhadap akses sertifikasi bidang pekerjaan.

Kebijakan sistematis dan strategis dalam penguatan SMK ini bertujuan untuk menghasikan SDM unggul yang siap berkerja dan mampu memenuhi kebutuhan spesifik bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri, dunia usaha maupun dunia kerja serta mampu mendorong adanya iniiitif berwirausaha bagi para lulusan SMK.

4) Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan SMK Kehutanan. Perkembangan pada sistem pengelolaan sekolah dan pengelolaan pembelajaran berbasis IT telah menjadi keniscayaan yang mendorong pengembangan manajemen sekolah dan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Adanya dukungan nyata dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mentransformasi model dan metode pembelajaran serta manajemen sekolah termasuk dukungan terhadap infrastruktur sekolah berbasis IT diharapkan mampu meningkatkan kuitas pelayanan terhadap pendidikan yang selanjutnya akan berimbaskan pada lulusan yang dihasilkan.

SMK kehutanan Negeri dengan dukungan dari kementerian Kehutanan juga terus berusaha bertransformasi mengikuti perkembangan yang ada melalui upaya peningkatan kapabilitas tenaga pendidik agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum serta mendorong tenaga kependidikan yang dimiliki untuk selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.

5) Tersedianya Standardisasi Kompetensi Kerja Bidang Kehutanan

Dengan telah diterbitkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kehutanan memberikan arah perancangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bagi lulusan SMK Kehutanan melalui skema sertifikasi yang disusun berdasarkan SKKNI. Adanya standar kompetensi ini memberikan kesempatan yang besar bagi

lulusan SMK Kehutanan untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan yang bersifat spesifik yang saat ini mulai banyak dibutuhkan baik dalam hal pengelolaan maupun pemanfaatan hutan dan hasil hutannya.

6) Terbukanya Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SMK Kehutanan

Dalam upaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap kerja, BP2SDM Kementerian Kehutanan dengan dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya merangkul para pihak seperti pemerintah daerah, perusahaan dan BUMN di sektor kehutanan untuk mendukung pengembangan dan penyelarasan kebutuhan bidang pekerjaan dengan proses penyiapan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui dukungan kebijakan dan memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan para pihak. Bentuk-bentuk Kerjasama tersebut diantaranya melalui Penyusunan kurikulum bersama untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, kesempatan magang / praktik kerja industri (Prakerin), narasumber praktisi industri untuk memberikan materi pembelajaran di sekolah, Penyediaan peralatan dan fasilitas praktik dan Rekrutmen tenaga kerja lulusan SMK.

BP2SDM juga mendorong SMK Kehutanan Negeri sebagai unit organisasi untuk membangun dan menjalin jejaring kerjasama pada tataran operasional yang diharapkan mampu mendukung pengembangan SMK Kehutanan Negeri.

b. Threats (Hambatan)

Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pengembangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam penyelenggaraan dan pembinaannya. Hambatan tersebut antara lain adalah :

1) Kepastian status hukum lahan yang belum jelas

Kepastian hukum terkait status lahan yang ditempati SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang sampai dengan saat ini masih

belum jelas berakibat pada upaya pengembangan fasilitas penunjang baik untuk kegiatan pendidikan (laboratorium, fasilitas Teaching Factory, Tempat uji Kompetensi terstandar), fasilitas asrama, pagar pembatas lingkungan sekolah serta fasilitas sekolah seperti penambahan ruang kelas. Kepastian hukum terkait status lahan ini menjadi sangat penting karena menjadi syarat mutlak dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari.

2) Intervensi eksternal yang mempengaruhi kebijakan sekolah

Intervensi adalah suatu tindakan campur tangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu sistem atau proses, dengan tujuan memengaruhi hasil atau arah dari sistem tersebut. Pada tataran positif intervensi akan memberi pengaruh kepada kinerja maupun output yang semakin membaik. Namun pada kondisi sebaliknya intervensi akan mengakibatkan melemahnya kebijakan dan keputusan yang berimbas pada output yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam menjalankan pengelolaannya masih mengalami intervensi khususnya yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang berhubungan penegakan aturan maupun kebijakan dalam pembinaan peserta didik. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadi yaitu lemahnya pengadministrasian dan penerapan SOP yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, ketidakpahaman orangtua /wali terhadap tata tertib maupun aturan lainnya yang diterapkan di SMK Kehutanan Negeri Manokwari serta ketidakkonsistenan manajemen sekolah dalam mengimplementasikan tata tertib pembinaan peserta didik.

3) Etos kerja dan sinergitas pegawai (Tenaga pendidik dan Kependidikan) yang belum optimal

Budaya kerja yang permisif, kurangnya teladan atau role model di lingkungan kerja, dukungan pelatihan dalam peningkatan

kapasitas yang rendah serta reward dan punishment yang tidak diterapkan secara adil merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta kedisiplinan tenaga pendidik maupun kependidikan. Kurangnya kerjasama dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan di sekolah, termasuk tenaga pendidik maupun kependidikan, orang tua, dan peserta didik juga berdampak pada lambatnya dalam penyelesaian masalah dalam lingkungan internal maupun eksternal.

4) Kesiapan mental lulusan untuk bekerja di IDUKA masih lemah

Ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, kurangnya etos kerja dan disiplin serta kemandirian merupakan beberapa penyebab rendahnya keberkerjaan lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada sektor swasta bidang kehutanan yang bergerak di tingkat tapak. Di wilayah Papua dan Maluku terdapat kurang lebih terdapat \pm 71 PBPH (Direktori Statistik Perusahaan Kehutanan 2022), dimana dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutan dibutuhkan tenaga teknis menengah kehutanan. Namun berdasarkan hasil data yang diperoleh dari pihak PBPH banyak lulusan yang mengundurkan diri karena alasan tidak sesuai dengan lingkungan kerja yang diharapkan.

Analisis SWOT

Dari pemetaan potensi lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut, dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan dan selanjutnya memetakan program dan kegiatan.

Gambar 1. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Internal Factor</p> <p style="text-align: center;">External Factor</p>	<p style="text-align: center;"><u>Strengths (Kekuatan)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Sekolah 2. Kurikulum 3. Penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kerja 4. Tata tertib sekolah 5. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pokok 6. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan 	<p style="text-align: center;"><u>Weakness (Kelemahan)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan (internal dan eksternal) yang tidak mendukung bagi proses pembelajaran dan bekerja 2. Belum optimalnya proses pembelajaran Teaching Factory 3. Kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan yang kurang memadai 4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan 5. Ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran yang belum memadai 6. Kurangnya pemahaman orang tua/ masyarakat terkait dunia kerja lulusan SMK Kehutanan yang berimbas pada rendahnya serapan tenaga kerja. 7. Proses penerimaan peserta didik yang belum dilaksanakan secara optimal
	<p style="text-align: center;"><u>Opportunities (Peluang)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Lapangan Pekerjaan Bagi Lulusan Cukup Tersedia 2. Terbukanya Kewirausahaan Di Bidang Kehutanan 3. Adanya Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan SMK 4. Adanya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 5. Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Bidang Kehutanan 6. Terbukanya Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SMK Kehutanan 	<p style="text-align: center;"><u>Strategi SO</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan manajemen sekolah sesuai dengan standarisasi 2. Peningkatan layanan satuan pendidikan (SMK) kepada para pihak
<p style="text-align: center;"><u>Threats (Ancaman)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian Status hukum lahan SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang belum jelas 2. Intervensi eksternal yang mempengaruhi kebijakan sekolah 3. Etos kerja dan sinergitas pegawai (Tenaga pendidik dan Kependidikan) yang belum optimal 4. Kesiapan mental untuk bekerja di IDUKA masih lemah. 	<p style="text-align: center;"><u>Strategi ST</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi di dunia kerja 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan 	<p style="text-align: center;"><u>Strategi WT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Pembangunan Kampus II di Sorong 1. Peningkatan tata kelola organisasi 2. Peningkatan mutu manajemen sekolah

Berdasarkan bagan pemetaan potensi lingkungan internal dan eksternal yang disusun, di hasilkan strategi pengembangan SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penyelesaian Pembangunan Kampus II di Sorong
2. Perbaikan tata kelola organisasi satuan pendidikan
3. Peningkatan layanan satuan pendidikan sesuai dengan standar layanan optimal.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabiilitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pembinaan serta fasilitas pendukung pembelajaran sesuai dengan standar layanan.
6. Menghasilkan jumlah lulusan yang sesuai dengan target capaian kinerja yang kompetitif, siap bekerja, mandiri, dan berakhlak mulia.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2025 - 2029

A. VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN

Sesuai dengan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Kementerian Kehutanan merumuskan Visi yang berisi rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kementerian Kehutanan disesuaikan tema RPJPN Tahun menuju Indonesia Emas 2045 yaitu:

“ Negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan ”

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan.

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan

nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar kawasan.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan

Visi Kementerian Kehutanan yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 untuk tahapan pertama 2025-2029 dengan tema Penguatan Fondasi Transformasi adalah sebagai berikut :

"Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat serta Dekarbonisasi Sektor Hutan"

Rumusan Visi Kementerian Kehutanan tersebut diterjemahkan kedalam 4 (empat) Misi pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Hutan yang Terjaga dan Mendukung Dekarbonisasi Hutan

2. Mewujudkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Hutan yang Lestari
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Adil dan Setara
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Baik.

Tujuan Kementerian Kehutanan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Kehutanan dalam mendukung pencapaian program prioritas Nasional yang sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Kehutanan. Tujuan ini mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dan selanjutnya dirumuskan dalam Sasaran Strategis Kementerian. Adapun tujuan Kementerian Kehutanan dalam periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Ekosistem Hutan yang Berkelanjutan
2. Meningkatnya Potensi Ekonomi Bidang Kehutanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan
4. Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang hendak dicapai oleh Kementerian Kehutanan pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2029. Sasaran Strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh kinerja kegiatan dan program yang disusun dalam menciptakan hasil/outcome. Sasaran

Strategis juga merupakan ukuran pencapaian Kementerian Kehutanan yang dirumuskan sesuai dengan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan dalam periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perlindungan Ekosistem Hutan Yang Berkelanjutan dan Mendukung Dekarbonisasi Hutan
2. Meningkatnya Ekonomi Melalui Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Lestari.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat desa di dalam dan Sekitar Hutan Melalui Akses Kelola Hutan Yang Adil dan Setara

4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, Kolaboratif, Profesional, dan Berdampak.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Visi, misi BP2SDM mengacu kepada visi misi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029. Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan, visi BP2SDM dalam mendukung pembangunan kehutanan yaitu:

"Penguatan Kompetensi SDM Kehutanan dan Peran Serta Masyarakat di bidang kehutanan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaya saing, responsif, dan adaptif terhadap perubahan dalam mencapai ekonomi hijau dan produktivitas berkelanjutan."

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Badan P2SDM disusun dengan mengacu pada Asta Cita Presiden. Berdasarkan tugas dan fungsinya, misi Badan P2SDM untuk mendukung terlaksananya misi

Kementerian Kehutanan adalah:

1. Penguatan Manajemen Talenta dalam Penyiapan SDM Kompeten di Lingkungan Kementerian Kehutanan.
2. Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) SDM Bidang Kehutanan
3. Pengembangan metode pembelajaran/pelatihan yang efektif dan masif serta meningkatkan kapasitas pengajar pelatihan.
4. Pembangunan KHDTK Hutan Diklat sebagai Pusat Unggulan Pengembangan Kompetensi SDM.
5. Meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan melalui peningkatan jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri.
6. Penguatan Komitmen dan Sinergitas Para Pihak dalam Penyuluhan dan Pendampingan
7. Masyarakat di Tingkat tapak.

8. Meningkatkan serapan tenaga kerja sektor kehutanan dari lulusan SMK Kehutanan Negeri.
9. Penguatan peran generasi Pelestari Hutan di tingkat tapak untuk pencapaian target NDC Sektor Kehutanan dan Pembangunan Kehutanan Lainnya;
10. Penguatan Sistem Tata Kelola dan Manajemen Data yang transparan, akuntabel dan reliabel.

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah disebutkan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah **“Penyiapan SDM Unggul dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Melalui tujuan ini diharapkan tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui penyiapan dan penyediaan SDM yang profesional dan kompeten, responsif, adaptif terhadap perubahan, problem-solving, komunikatif, berinisiatif dan berkeinginan untuk sukses (*target oriented*).

C. VISI, MISI DAN TUJUAN SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI

Untuk mewujudkan visi dan Misi B2SDM Kementerian Kehutanan, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari telah merumuskan visi, misi serta tujuan yang bertautan dengan visi dan misi Badan P2SDM Kementerian Kehutanan yaitu :

1. Visi SMK Kehutanan Negeri Manokwari

Melaksanakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan yang siap kerja, mandiri, kompetitif dan berakhlak mulia

2. Misi SMK Kehutanan Negeri Manokwari

- a. Menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang mampu bekerja secara profesional;
- b. Menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional;
- c. Menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang memiliki nilai dasar rimbawan;

- d. Mengembangkan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang Wiyata Mandala
3. Tujuan SMK Kehutanan Negeri Manokwari
Terciptanya Lulusan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan Yang Siap Kerja, Mandiri, Kompetitif Dan Berakhlak Mulia Yang Berkompeten dan Profesional Yang Mampu Bersaing Pada Tingkat Nasional Maupun Internasional. Dari SMK KEHUTANAN diharapkan dapat lahir rimbawan yang berjiwa pancasila, mencintai alam dan lingkungannya, jujur, disiplin, bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat, memiliki pengetahuan dan ketrampilan kehutanan tingkat menengah, dan berjiwa serta berperilaku sebagai pelopor pembangunan.

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

A. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN *OUTPUT* KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Mengacu pada Program Kegiatan yang tertuang dalam Restra Kementerian Kehutanan 2025 – 2029, terdapat 3 (tiga) Program yang didukung oleh Badan P2SDM, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien.

2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sasaran Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan.
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan serta meningkatkan kualitas SDM sektor kehutanan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM Kehutanan serta menyiapkan SDM Kehutanan termasuk generasi pelestari hutan dalam pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan serta menyiapkan lulusan SMK kejuruan kehutanan untuk dapat langsung bekerja di bidang Kehutanan dan dunia usaha guna membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. BP2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM, Pendidikan dan Pelatihan SDM Kehutanan, ***Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan*** dan Pengembangan Generasi Pesta Hutan. BP2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kementerian Kehutanan memiliki 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 4 (empat) Sasaran Strategis serta diukur keberhasilannya melalui 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan rancangan indikator tersebut, BP2SDM mendukung pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan yaitu "Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan" dan "Nilai Reformasi Birokrasi". Dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, BP2SDM mendukung melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan
2. Proporsi Lulusan SMK Kehutanan yang Bekerja dibidang Kehutanan Meningkat
3. Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

Mengacu pada Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM, SMK Kehutanan Negeri mendukung 3 (tiga) IKP yang telah ditetapkan, yaitu

1. Proporsi Lulusan SMK Kehutanan yang Bekerja dibidang Kehutanan Meningkat
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

Untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Program pada setiap kegiatan, sasaran dan indikator kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari disusun secara relevan seperti yang tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari

No	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Proporsi Lulusan SMK Kehutanan yang Bekerja dibidang Kehutanan	Tersedianya Lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat serta bekerja dibidang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat • Persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya efektifitas pengelolaan dan akuntabilitas Kinerja Instansi / UPT dengan mengintegrasikan sistem perencanaan, penggaran dan pelaporan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase program/kegiatan yang selaras antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. • Nilai evaluasi yang makin meningkat • Persentase realisasi anggaran terhadap output yang direncanakan • Tingkat kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan kinerja • Tingkat pemanfaatan aplikasi /perangkat sistem informasi kinerja terpadu • Persentase SDM yang mengikuti pelatihan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
3	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Terselenggaranya kegiatan sesuai dengan RKKL Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Maturitas SPIP unit organisasi yang semakin meningkat • Persentase risiko strategis dan operasional yang diidentifikasi dan dimitigasi. • Persentase pelaporan pengendalian intern yang disampaikan tepat waktu oleh unit kerja. • Tingkat efektivitas sistem pelaporan dan pemantauan pengendalian intern berbasis

No	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			aplikasi.

B. KOMPONEN KEGIATAN MASING-MASING *OUTPUT* KEGIATAN

Berdasarkan tahapan atau bagian yang digunakan untuk menunjang pencapaian dari kegiatan “Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan” dengan sasaran kegiatan “Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan” dan Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) “Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang berkompeten dan bersertifikat yang bekerja dibidang Kehutanan” maka disusunlah Komponen Kegiatan dengan rumusan setiap tahun seperti pada tabel berikut:

Tabel 7. Komponen Kegiatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari

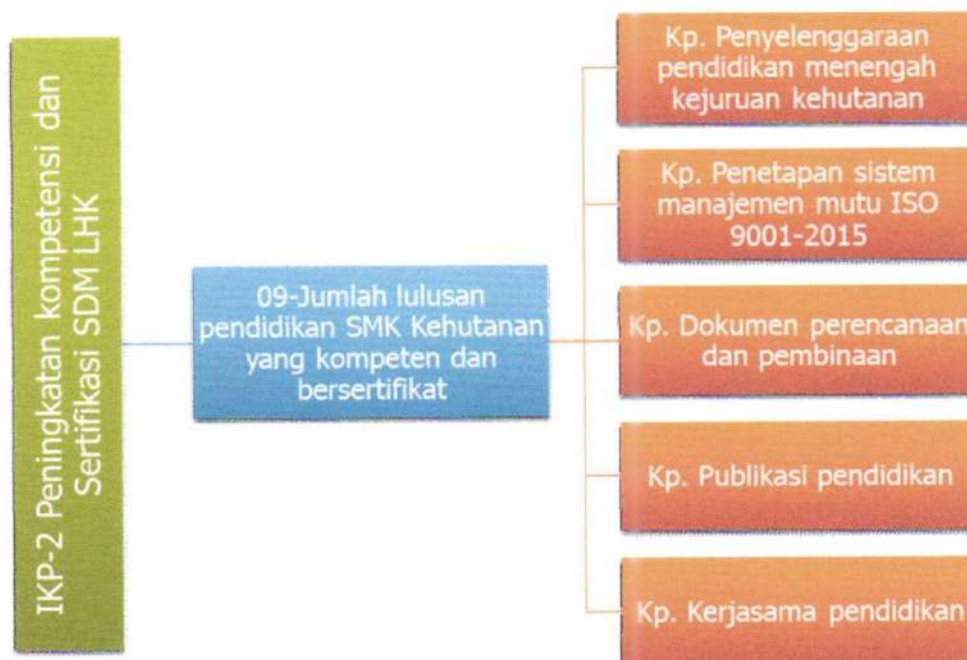
Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>)	Komponen Kegiatan	Satuan
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan			
	Sasaran : Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan		
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat yang bekerja dibidang Kehutanan Persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan 		450 Orang
			30 %
		a. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	
		b. Penetapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015	
		c. Dokumen perencanaan dan pembinaan	
		d. Publikasi pendidikan	
		e. Kerjasama pendidikan	
	Layanan Perkantoran		Layanan
		a. Gaji dan Tunjangan	
		b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. PETA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

Perumusan sasaran program, sasaran kegiatan dan komponen kegiatan pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari disusun berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan Badan P2SDM dengan mengacu dari sasaran strategis Kementerian LHK yang telah disusun. Sebagai penjabaran dan penyelarasan sasaran program dan sasaran kegiatan pada Badan P2SDM dengan sasaran program, sasaran kegiatan dan komponen kegiatan pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari disusun peta *cascading* seperti gambar berikut. *Cascading* tersebut disusun untuk dapat mengetahui konsistensi antara rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan yang telah disusun Badan P2SDM dengan sasaran program, sasaran kegiatan dan komponen kegiatan yang telah disusun SMK Kehutanan Negeri Manokwari untuk mendukung pencapaian *output*.



Gambar 2. *Cascading* SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025-2029

B. TARGET KINERJA

Target yang terdapat pada indikator kinerja kegiatan Badan P2SDM yaitu "Proporsi lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat yang berkerja di bidang Kehutanan" merupakan target yang akan dicapai oleh SMK Kehutanan Negeri Manokwari hingga Tahun 2029. Rincian besaran target IKK SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025 sampai tahun 2029 dapat dilihat pada Tabel 11, dengan rincian target per tahun sebagai berikut:

Tabel 8. Target IKK SMK Kehutanan Negeri Manokwari Per Tahun

Sasaran IKK	IKK SMKKN Manokwari	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
04-Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	09-Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	orang	79	90	90	90	90
	Persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan	%	30	30	30	30	30

C. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, rencana alokasi anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan sebagaimana tercantum pada Renstra Badan P2SDM Tahun 2025-2029 adalah sebesar Rp 79.797.188.000 Anggaran ini disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target dan kemampuan kelembagaan dan SDM yang dimiliki, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 9. Rencana Alokasi Pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Milyar Rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	19.944.922	19.927.126	19.950.950	19.982.201	19.974.190	79.797.188

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan P2SDM yang mendukung Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dengan mempertimbangkan kebijakan dan arahan Presiden RI periode 2024-2029 pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana program, kegiatan dan komponen SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025-2029 yang disusun merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan kehutanan.

Disadari bahwa pada saat penyusunan rencana dipengarungi oleh banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji. Sasaran kegiatan di SMK Kehutanan Negeri Manokwari sangat dipengaruhi oleh kebijakan Kementerian Kehutanan serta kebijakan nasional. Beberapa langkah pembaruan juga dilakukan guna mendukung kebijakan Presiden RI dan Pemerintah saat ini, serta perkembangan teknologi yang semakin berkembang.

Rencana Strategis SMK Kehutanan Manokwari Tahun 2025-2029 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan, upaya dan kerja keras dari segenap unsur jajaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari yang harus dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien.

LAMPIRAN

**MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA SMK KEHUTANAN NEGERI
MANOKWARI TAHUN 2025-2029**

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Prog /Keg	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
	Sasaran Strategis 4 - Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing													
	IKU 13 – Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan													
	IKU 18 - Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK													
	IKU 19 – Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK													
	IKU 20 - Level Maturitas SPIP KLHK													
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM													
	Sasaran Program (Outcome) 2 - Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK													
	IKP 2 - Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	Orang												
	Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan													
	Sasaran: Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan													
	IKK 9 - Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	458	472	472	472	472							
	IKK SMK Kehutanan Negeri Manokwari	Orang	79	90	90	90	90	19,94	19,92	19,95	19,98	19,97		SMKKN Manokwari
	<i>a. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan</i>													
	<i>b. Penetapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015</i>													
	<i>c. Dokumen perencanaan dan pembinaan</i>													
	<i>d. Publikasi pendidikan</i>													
	<i>e. Kerjasama pendidikan</i>													

**MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA SMK KEHUTANAN NEGERI
MANOKWARI TAHUN 2025-2029**

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Prog /Keg	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
	Sasaran Strategis 4 - Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing													
	IKU 13 - Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan													
	IKU 18 - Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK													
	IKU 19 - Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK													
	IKU 20 - Level Matritis SPIP KLHK													
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM													
	Sasaran Program (Outcome) 2 - Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK													
	IKP 2 - Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	Orang												
	Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan													
	Sasaran: Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan													
	IKK 9 - Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	458	472	472	472	472							
	IKK SMK Kehutanan Negeri Manokwari	Orang	79	90	90	90	90	19,94	19,92	19,95	19,98	19,97	SMKKN Manokwari	
	a. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan													
	b. Penetapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015													
	c. Dokumen perencanaan dan pembinaan													
	d. Publikasi pendidikan													
	e. Kerjasama pendidikan													